



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI

KE PT JAMKRINDO, KABUPATEN LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022

TANGGAL 19 - 21 NOVEMBER 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT JAMKRINDO, KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 19 - 21 NOVEMBER 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Koperasi dan UKM, Perdagangan, BUMN, dan Investasi telah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik pada tanggal 19 – 21 November 2021 ke Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka melihat perkembangan kegiatan usaha penjaminan bagi UMKM, BUMN dan sistem resi gudang,

Selain itu Komisi VI telah menjalankan fungsi pengawasan terkait penugasan BUMN tersebut di Kabupaten Lombok Barat dengan melihat secara langsung optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional khususnya

di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik adalah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari pihak terkait klaim pencapaian PT Jamkrindo hingga Oktober 2021, bersama dengan anak usahanya PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), telah mencatatkan volume penjaminan KMK PEN senilai Rp 23,32 triliun dengan rincian PT Jamkrindo senilai Rp 15,94 triliun dan PT Jamsyar senilai Rp 7,38 triliun dengan jumlah debitur terjamin sebanyak 1.470.485 UMKM.

Secara lebih khusus, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui peran signifikan PT Jamkrindo dalam mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan tumbuh di masa pandemi covid-19. apakah dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UKM, maupun oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Koperasi dan UKM, Perdagangan, BUMN, dan Investasi telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pulau Lombok NTB terkait kegiatan usaha penjaminan bagi UMKM, BUMN, sistem resi gudang yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 November 2021.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan dengan PT Jamkrindo dan para pemangku kepentingan baik dari Kementerian BUMN, dan jajaran pemerintah daerah Lombok Barat bertempat di kabupaten Lombok Barat, NTB.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok Provinsi NTB sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE, MAP.	PIMP./ F.PG
2	A-232	I NYOMAN PARTA	F.PDIP
3	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP
4	A-199	DR. Ir. HARRIS TURINO, M.Si, MM	F.PDIP
5	A-274	Ir. H.M. IDRIS LAENA	F.PG
6	A-335	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, ST, SH, MH,	F.PG
7	A-321	Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI W, M.Si	F.PG
8	A-65	ANDRE ROSIADE	F.GERINDRA
9	A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADLULAH, B.Bus, MM, MBA	F.GERINDRA
10	A-115	KHILMI	F.GERINDRA
11	A-131	Ir.L H. LA TINRO LA TUNRUNG	F.GERINDRA
12	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F,NASDEM
13	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F.PKB
14	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN , S.Sos	F.PKS
15	A-485	H. JON ERIZAL SE, MBA	F.PAN
16	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	F.PAN
17	A-499	Hj. INTAN FAUZI, SH, LLM	F.PAN

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB menunjukkan bahwa Sejak 2020, PT Jamkrindo yang menjadi bagian dari *holding Indonesia Financial Group* (IFG) mendapat penugasan dari pemerintah untuk menjamin kredit modal kerja (KMK) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hingga 29 Juni 2021, Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan kredit telah menjamin KMK dalam rangka PEN sebesar Rp17,3 triliun dengan total jumlah debitur sebanyak 1,054 juta debitur.

Sebelum mendapat penugasan pemerintah untuk menjamin KMK dalam rangka PEN, PT Jamkrindo mendapat penugasan untuk menjamin KUR. Total volume penjaminan KUR dari 2007-April 2021 mencapai Rp453,7 triliun. Adapun volume tahun kalender sampai dengan April 2021 Rp40,6 triliun, meningkat 43 persen dari periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp28,4 triliun.

PT Jamkrindo menyatakan pihaknya senantiasa meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM dan Koperasi melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara

berkelanjutan. Ditambahkan, Jamkrindo sebagai perusahaan penjamin terbesar, terlibat aktif dalam upaya mendorong agar UMKM bisa naik kelas.

Kepada Komisi VI DPR RI, PT Jamkrindo menegaskan komitmen penguatan UMKM ke depan melalui penguatan infrastruktur digital dan akses permodalan yang mudah dan tepat sasaran. Diungkapkan bahwa pihak PT Jamkrindo telah menyiapkan berbagai infrastruktur dan akses pendukung demi memberikan kemudahan dalam memberikan pengajuan penjaminan, dan juga mengakomodir kebutuhan UMKM dalam hal pemberdayaan, sehingga ke depan menjadi UMKM yang naik kelas.

Diketahui PT Jamkrindo bersama dengan anak usahanya PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), mencatat volume penjaminan sebesar Rp159 triliun dengan perincian yakni, penjaminan KUR sebesar Rp116 triliun, penjaminan PEN sebesar Rp15 triliun dan penjaminan non-KUR sebesar Rp28 triliun, dengan jumlah debitur terjamin yang telah diberikan penjaminan kredit oleh PT Jamkrindo sebanyak 21.01 juta.

Dari penjelasan PT Jamkrindo pada saat kunjungan kerja spesifik ini dilakukan, terungkap bahwa tujuan dan manfaat dari hadirnya BUMN tersebut di Provinsi NTB khususnya di Kabupaten Lombok Barat adalah:

1. PT Jamkrindo mendukung gerak ekonomi khususnya UMKM di NTB:
 - a. PT Jamkrindo, dari segi laporan keuangan tetap tumbuh positif walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 dan tetap melakukan penjaminan kredit bagi pelaku usaha.
 - b. Salah satu tujuan kehadiran PT Jamkrindo di NTB khususnya di kabupaten Lombok Barat adalah untuk dapat memberikan penjaminan kepada UMKM agar mudah mendapatkan pinjaman, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - c. PT Jamkrindo di Provinsi NTB menyatakan, dapat membantu UMKM yang *feasible* (layak), tetapi tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan pinjaman). Para pelaku UMKM bisa mendapatkan manfaat lebih baik serta bisa naik kelas sehingga menjadi *bankable*. Jika nanti status (UMKM) sudah bisa *bankable*, mereka bisa mengajukan (pinjaman) sendiri tanpa harus ada penjaminan.

2. Manfaat KUR dari PT Jamkrindo bagi UMKM :
 - a. Pelaku UMKM untuk pengajuan KUR kepada PT Jamkrindo bisa diakses melalui www.umkmlayak.co.id yang merupakan platform digital yang dibuat sebagai layanan akses modal usaha UMKM dan kebutuhan mengikuti berbagai pelatihan.
 - b. PT Jamkrindo tidak hanya memberikan pemahaman terkait modal saja untuk para pelaku UMKM. Namun bisa juga memberikan jasa pelatihan-pelatihan untuk menjadi pengusaha yang lebih baik lagi. Hal ini menjadi contoh bagi BUMN-BUMN lain agar bisa tanggung jawab dalam segi sosial dan lingkungan, sehingga diharapkan UMKM akan bisa berkembang lebih maju lagi,

PT Jamkrindo, di saat pandemi Covid19, menyatakan masih tumbuh positif dalam segi hal penjaminan, baik nasional dan juga daerah. Saat ini PT Jamkrindo sudah mulai membina UMKM sebanyak 500 binaan di tahun 2021. Direncanakan ke depannya bisa bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun 2022.

Solusi yang bisa dilakukan oleh PT Jamkrindo) adalah dapat memberikan jaminan kredit. Hal ini penting karena selama ini menjadi masalah bagi pinjaman UMKM adalah terkait agunan.

III. REKOMENDASI

1. Komisi VI DPR RI mendorong PT Jamkrindo agar capaian yang ditargetkan semakin luas dan dapat meningkatkan lebih nyata lagi fungsinya membantu UMKM.
2. PT Jamkrindo diharapkan bisa lebih memberikan sosialisasi sekaligus juga pendampingan kepada UMKM guna menjawab apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terutama dari segia permodalan,
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Jamkrindo segera mengatasi permasalahan para pelaku sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kerap sulit mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dianggap tidak feasible (layak) dan tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan pinjaman). karena pelaku UMKM ini

menjadi tulang punggung roda perekonomian di Indonesia.

4. Komisi VI DPR RI mendorong hadirnya PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) agar lebih meningkatkan upaya pemberian jaminan kredit. terutama masalah yakni terkait agunan.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI BANTEN**

TTD.

GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE, MAP.

A. 327

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI berfoto bersama sesuai diskusi pendalaman dengan PT Jamkrindo



Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mendapatkan cinderamata Kabupaten Lombok Barat sesuai berdialog dengan pimpinan PT Jamkrindo dan Pemda Lombok Barat



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI saat pertemuan di kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.